

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, Soejonodan H., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adji, Indriyanto Seno, 2011, *KUHAP dalam Prospektif*, Diadit Media, Jakarta.

Amatrudi, Anthony dan Leslie William Blake, 2015, *Human Rights and the Criminal Justice System*, Routledge, New York.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andrews, John A., ed., 1982, *Human Rights in Criminal Procedure: A Comparative Study*, Martinus Nijhoff Publishers, London.

Anggara et.al, 2015, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

———, ed. 2014, *Praperadilan di Indonesia, Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Arikunto, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Asi Mahastya, Jakarta.

Asmarawati, Tina, 2014, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Chambliss, Willian J., ed., 2011, *Courts, Law and Justice*, SAGE Publications, Inc. California.

Dinstein, Yoran dan Mala Tabory, 1995, *Israel Yearbook on Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, London.

Doak, Jonathan dan Claire McGourlay, 2012, *Evidence in Context*, Routledge, New York.

Doak, Jonathan, 2008, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*, Hart Publishing, Portland.

- Durston, Gregory, 2008, *Evidence: Text and Materials*, Oxford University Press, Oxford.
- Hails, Judy, 2009, *Criminal Evidence*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice dan Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika, Jakarta Selatan.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan, Pemasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. , 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Jackson, John D. dan Sarah J. Summers, 2012, *The Internationaliation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Tradition*, Cambridge University Press, Cambrigde.
- Keane, Adriane dan Paul McKeown, 2012, *The Modern Law of Evidence*, Oxford, Oxford University Press.
- Lemek, Jeremias, 2009, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, New Merah Putih, Yogyakarta.
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mantovani, Reda Mantovani, 2015, *Penyadapan vs. Privasi: Tinjauan Yuridis, Kasus, dan Komparatif*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, hlm. 18.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 33.
- Mukianto, Jandi, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, Standford.

- Pangaribuan, Luhut M., 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Roberts, Paul dan Adrian Zuckerman, 2010, *Criminal Evidence*, Oxford University Press, Oxford.
- Ross, Jacqueline dan Stephen C. Thaman, ed., 2016, *Comparative Criminal Procedure*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts.
- Ryan, Andrea, 2014, *Towards a System of European Criminal Justice: The Problem of Admissibility of Evidence*, Routledge, New York.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, Surakarta, UNS Press.
- Thaman, Stephen C., ed., 2013, *Exclusionary Rules in Comparative Law*, Springer, London.
- Van Kempen, P.H.P.H.M.C., ed., 2014, *Criminal Law and Human Rights*, Ashgate Publishing Company, Burlington.
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596).

C. KOVENSI INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 217A, 10 Desember 1948.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 November 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 2 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/PK/Pid.Sus/2009 perihal peninjauan kembali perkara terpidana Hillary K. Chimezie.

Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 105/Pid.B/2013/PN.BU dengan terpidana Sumartini alias Eti binti Sumaryono.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 81/Pid/Prap/2015 perihal perkara Praperadilan dalam perkara antara PT Victoria Securities Indonesia terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 perihal pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara Terpidana Michael Titus Igweh.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1969 K/Pid.Sus/2014 perihal pemeriksaan perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan Terdakwa Sumartini alias Eti binti Sumaryono.

E. JURNAL, MAKALAH/PIDATO, ARTIKEL, HASIL PENELITIAN

Amnesty International, 2014, *Fair Trial Manual*, Amnesty International Publications, London.

Bassiouni, M. Cherif, 1993, "Human Rights in The Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protection and Equivalent Protections in National Constitutions, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol. 3.

Boyne, Shawn Marie, 2015, "Procedural Economy in Pre-Trial Procedure: Developments in Germany and The United States, *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol. 24.

Capowski, John J., 2012, "China's Evidentiary and Procedural Reform, the Federal Rules of Evidence, and the Harmonization of Civil and Common Law", *Texas International Law Journal*, Vol. 47, No. 3.

Damaska, Mirjan R. Damaska, 1995, "Free Proof and Its Detractors", *Yale Law School Faculty Scholarship*, Vol. 43.

_____, 1973, "Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 121.

_____, 1978, "The Death of Legal Torture", *The Yale Law Journal*, Vol. 87, No. 4.

_____, 1995, "Free Proof and Its Detractors", *Yale Law School Faculty Scholarship*, Vol. 43.

_____, 2006, "The jury and the law of evidence: real and imagined interconnections", *Law, Probability and Risk*, Vol. 5.

- Demleitner, Nora V., 1999, "More Than "Just" Evidence: Reviewing Mirjan Damaska's Evidence Law Adrift, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 47, No. 3.
- Dufraimont, Lisa, 2008, "Evidence Law and the Jury: A Reassessment", *McGill Law Journal*, Vol. 53.
- Dwyer, Deirdre M. Dwyer, 2006, "Book Review: Foundations of Evidence Law by A. Stein", *Law Probability and Risk*, Vol. 5.
- Eryilmaz, Mesut Bedri, 1997, "Remedy of Exclusion of Evidence against the Abuse of Police Powers in English and Turkish Laws", *Turkish Yearbook of Human Rights*, Vol. 19-20.
- Gunawan, Ricky, 2012, "Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika", *Jurnal Dictum*, Edisi 1.
- Guo, Zhiyuan, 2017, "The first step of the long march: implementing the exclusionary rules in China", *Asia Pasific Law Review*, Vo. 25, No. 1.
- Hidayat, Nurcholis dan Restaria Hutabarat, ed., 2012, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*, The Partnership for Governance Reform, Jakarta.
- Hsieh, Kuo-Hsing, 2011, "The Exclusionary Rule of Evidence in The United Kingdom, United States and China, *Disertasi*, University of Edinburgh.
- Illinois Governor's Commission on Capital Punishment, 2002, "Report of the Governor's Commission on Capital Punishment."
- Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun, 2014, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Jackson, John D., 2005, "The Effect of Human Rights on Criminal Evidentiary Processes: Towards Convergence, Divergence or Realignment?", *The Modern Law Review*, Vol. 68, No. 5.
- Kaur, Kuljit, 2007, "Protection of Human Rights and Criminal Justice System", dalam *International Conference: Criminal Justice Under Stress*.
- Kaylor, Elizabeth H., 2014, "Crime Control, Due Process and Evidentiary Exclusion: When Exceptions Become the Rule", *Proceedings of the New York State Communication Assosiation*, Vol. 2013, No. 6.

- Kerameus, Kontantinos D., 1987, "A Civilian Lawyer Looks at Common Law Procedure", *Lousiana Law Review*, Vol. 47, No. 3.
- Korngold, Howard L., 2003, "A Comparative Perspective on the Exclusion of Relevant Evidence: Common Law and Civil Law Jurisdictions", *Dalhousie Journal of Legal Studies*, Vol. 12.
- Langbein, John H., 1996, "The Historical Foundations of the Law of Evidence: A View from the Ryder Sources", *Yale Law School Scholarship Repository*.
- Maulana, Arif Maulana, ed., 2016, *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan: Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013-2016*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta.
- Prabangsa, Aria, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Praditya, Daniel, 2015, *HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana: Studi Pemahaman HAM oleh Polisi dalam Proses Penyidikan di Polres Kendal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Rudovsky, David, 2005, "Running in Place: The Paradox of Expanding Rights and Restricted Remedies", dipresentasikan dalam Memorial Lecture on Civil Rights and Civil Liberties di University of Illinois College of Law.
- Skinninger, Eileen, 2005, "Improperly or Illegally Obtained Evidence: The Exclusionary Evidence Rule in Canada", International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.
- Soebekti, 1979, "Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang", *Hukum dan Pembangunan*, No. 4 tahun IX, hlm. 349.
- Spencer, John R., 2016, "Adversarial vs Inquisitorial system: is there still such difference", *The International Journal of Human Rights*, Vol. 20, No. 5.
- Susilo, Herys, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Thaman, Stephen C., 2010, "Fruit of the Poisonous tree in Comparative Law", *Southwestern Journal of International Law*, Vol. 16.
- Turner, Jenia Iontcheva, 2014, "The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law", *Southern Methodist University Law review*, Vol. 67.
- Van Caenegem, William, 2007, "New trends in illegal evidence in criminal procedure: general report – common law", dipresentasikan dalam World Congress of the International Association of Procedural Law, Salvador.

Whitman, James Q., 2009, "Equality in Criminal Law: The Two Divergent Western Roads", *Journal of Legal Analysis*, Vol. 1, No. 1.

Widodo, Rusman Widodo, *ed.*, 2015, "Profesionalisme Dua Lembaga", *Wacana HAM*, ed. I, No. XIII.

William van Caenegem, 1999, "Advantages and disadvantages of the adversarial system in criminal proceedings", *Law Faculty Publications*.

Zhang, Jixi, 2009, "Fair Trial Rights in ICCPR", *Journal of Politics and Law*, Vol. 2, No. 4.

F. INTERNET

Groma, J., "Overall human values in context of institute of criminal procedural compulsory measures", 2014, dalam 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health, Welfare, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2014/07/shsconf_shw2012_00010/shsconf_shw2012_00010.html.

Institute for Criminal Justice Reform, "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik", <http://icjr.or.id/pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-icjr-dorong-pemerintah-atu-ulang-kedudukan-bukti-elektronik/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, "Laporan Data Pengaduan 2015", hlm. 6, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017, "Laporan Data Pengaduan 2016", hlm. 7, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/>

Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017, Laporan Pengaduan Bulan Januari – Agustus 2017, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2016, "Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016", diakses melalui <https://www.kontras.org/home/index.php?id=2&sid=5&module=literature>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2017, "Penyiksaan Buka Solusi Penegakan Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2017", diakses melalui <https://www.kontras.org/home/index.php?id=2&sid=5&module=literature>

G. LAIN-LAIN

Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Srjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.